

Format Usulan Program RAN OGI VII 2023-2024

Negara	Indonesia		
Nomor dan Nama Komitmen	Penanganan Disinformasi dalam Pemilu 2024		
Deskripsi Singkat Komitmen	Penanganan Disinformasi dalam Pemilu 2024 merupakan upaya untuk mencegah dan menangani secara efektif penyebaran informasi yang dikaburkan dan palsu dalam Pemilu 2024. Disinformasi dalam Pemilu sering kali terjadi karena kesengajaan dari orang pribadi atau kelompok untuk kepentingan politik dalam Pemilu. Disinformasi dapat merusak proses Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. Bahkan dapat menyebabkan kekacauan dalam Pemilu sehingga hak-hak politik warga menjadi terganggu dan berpotensi menghilangkan independensi pemilih dalam memilih calon.		
Pengusul Komitmen	Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)
	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kominfo dan Kemendagri	KOPEL Indonesia	Provider platform media sosial
Jangka Waktu	2 Tahun		

Identifikasi Masalah
<p>1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?</p> <p>Dalam penyebaran berita palsu atau berita tidak benar dalam Pemilu pihak yang terdampak adalah masyarakat (Pemilih). Masalah ini akan terjadi pada secara online lewat media digital, media sosial dan sarana offline oleh tim sukses. Pemilih adalah pihak yang akan sangat terpengaruh dengan disinformasi pada saat kampanye Pemilu 2024 dan saat hari H pemilihan karena mereka yang menjadi sasaran utama dari pelaku disinformasi. Masalah ini mulai muncul pada saat tahapan awal Pemilu 2024 dan akan berpengaruh pada masyarakat (pemilih) hingga perhitungan suara hasil Pemilu 2024.</p>
<p>2. Apa penyebab permasalahan tersebut?</p> <p>Penyebab utama terjadinya disinformasi dalam Pemilu adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang pribadi, tim sukses, partai politik membolehkan segala cara untuk mempengaruhi pemilih 2. Partai politik tidak taat kode etik dan aturan penyampaian informasi publik dalam Pemilu 2024

3. Masyarakat (pemilih) tidak memahami adanya upaya sejumlah pihak untuk mempengaruhi pilihan pemilih lewat penyebaran berita-berita palsu/tidak benar.

Persoalan ini berkembang menjadi masalah yang serius dalam pemilu karena

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat (pemilih) tentang Pemilu yang berintegritas
2. Masih lemahnya pengawasan dan penanganan disinformasi Bawaslu terhadap pelaku disinformasi
3. Peran serta provider platform media sosial tidak menyaring informasi-informasi palsu dan tidak benar

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Upaya yang telah dilakukan pada Pemilu sebelumnya:

1. Penandatanganan Pakta Integritas dengan caleg dan partai politik untuk memberikan berita yang benar kepada pemilih
2. Roadshow kepada partai politik
3. Melakukan edukasi kepada pemilih untuk mengidentifikasi dan menyeleksi berita dan informasi yang palsu dan tidak benar.
4. Mendorong Bawaslu dan KPU untuk mencegah dan menangani informasi tidak benar dalam selama Pemilu.
5. Melakukan penelusuran (tracking) rekam jejak caleg dan menyampaikannya ke Bawaslu dan Publik.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Untuk memecahkan masalah ini, KOPEL Indonesia akan:

1. Mendorong Bawaslu untuk membuat mekanisme penanganan pengaduan terkait dengan disinformasi.
2. Menginisiasi forum multipihak termasuk pelibatan Kominfo, Kemendagri, provider platform media sosial untuk penanganan yang holistik terhadap disinformasi dalam Pemilu.
3. Memberikan edukasi dan informasi ke publik tentang kriteria dan cara mengidentifikasi informasi palsu/tidak benar.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Hasil yang ingin dicapai adalah:

1. Masyarakat (pemilih) memiliki independensi dan obyektif dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilu tanpa pengaruh dari disinformasi.
2. Bawaslu menangani pengaduan tentang penyebaran disinformasi dengan cara yang efektif. Dengan output tersebut masyarakat akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi informasi-informasi yang palsu/tidak benar. Begitu pula, Bawaslu akan memiliki kapasitas untuk menangani pengaduan tentang disinformasi dengan cara yang efektif.

Analisa Komitmen

Pertanyaan	Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	<p>Dengan komitmen ini masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi informasi palsu/tidak benar menjadikan masyarakat lebih sadar terhadap pentingnya informasi dan data. Sehingga mereka akan sadar untuk mengakses data-data pengaduan di Bawaslu dan data tentang caleg, calon presiden dan partai politik yang disediakan oleh KPU.</p> <p>Dalam komitmen ini, pemerintah akan terlibat dalam forum multistakeholder. Di sini mereka akan terlibat secara aktif memberikan solusi terhadap penanganan disinformasi sehingga kesadaran tentang pentingnya informasi kepada publik akan muncul.</p>
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	<p>Penanganan disinformasi Pemilu adalah bagian dari akuntabilitas dari penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya dalam mengawasi Pemilu agar berjalan dengan tanpa ada gangguan dan tugasnya dalam melindungi hak masyarakat (pemilih) dari gangguan informasi-informasi palsu dan tidak benar yang dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitas dalam memilih memilih calon.</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan publik terhadap disinformasi akan termasuk di dalamnya bagaimana proses dan hasil pengaduan tersebut dipublikasikan dalam kanal pengaduan Bawaslu sehingga masyarakat dapat memonitoring dan mengevaluasi secara transparan.</p>
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	<p>Dalam komitmen ini akan termasuk bagaimana Bawaslu memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya mekanisme penanganan pengaduan disinformasi dalam Pemilu sehingga masyarakat akan mengetahui adanya hak mereka untuk berpartisipasi dalam bentuk pengaduan dan hak mereka dalam memonitoring tindak lanjut dari pengaduan.</p>

Perencanaan Komitmen

(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)

Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan		
1. Lahirnya mekanisme penanganan pengaduan disinformasi oleh Bawaslu RI	1. Mekanisme pengaduan yang disetujui oleh Ketua Bawaslu	31 Juli 2022	Penanggungjawab Utama:		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Bawaslu	KOPEL Indonesia	Provider platform media sosial
		31 Juli 2022	Penanggungjawab Utama:		

2. Adanya forum multistakeholder penanganan pengaduan disinformasi oleh Bawaslu	1. Komitmen yang muncul dalam Pertemuan-pertemuan Forum multipihak untuk mengambil peran dalam penanganan disinformasi dalam Pemilu 2024	<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
		K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
		Bawaslu	KOPEL Indonesia	Provider platform media sosial